

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:

- 1) Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
- 2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
- 3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian.

Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktek menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian moden, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

- 1) Peranan alokasi
- 2) Peranan distribusi, dan
- 3) Peranan stabilisasi.

Sementara itu, Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran kesejahteraan sosial, 4) peran mengelola ekonomi makro. Penjelasan keempat peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan

pribadi.

3. Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (*transfer payment*) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat.

4. Peran pengelolaan ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, *full employment*, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

1. Peran Alokasi

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta.

Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Contoh dari barang/jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar, misalnya jalan, pembersihan udara, dan sebagainya. Lain halnya dengan barang swasta, seperti halnya sepatu, dan sebagainya. Barang-barang swasta dapat disediakan melalui sistem pasar oleh karena barang-barang tersebut mempunyai sifat pengecualian.

2. Peran Distribusi

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil.

Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi oleh karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijaksanaan pengeluaran pemerintah misalnya: perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani dan sebagainya.

Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Salah satu peranan tersebut kita kenal dengan nama fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sehingga pada intinya fungsi alokasi memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik.

3. Peran Stabilisasi

Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan ke sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan mobil menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pegawai. Pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti sepatu, TV, pakaian yang seterusnya pengusaha sepatu, TV, dan pakaian akan mengurangi pegawai. Jadi gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain, yang tanpa adanya campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilisasi ekonomi. Inflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilisasi ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui kebijaksanaan moneter.

B. Pengertian DIPA

Anggaran (*budget*) merupakan suatu daftar yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu yang biasanya dalam ukuran satu tahun. Waktu berlakunya anggaran ada yang disusun berdasarkan atas tahun kalender yaitu mulai 1 Januari dan ditutup 31 Desember atau dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret, (Suparmoko, 1987: 49). Salah satu aplikasi anggaran tersebut kemudian di satker di susun DIPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran tiap tahunnya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

DIPA berasal dari keuangan negara dimana keuangan negara menurut Saidi (2011: 10) adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala kewajiban yang timbul karenanya atau segala hal dan kewajiban baik uang maupun barang negara yang dapat dinilai dengan uang.

Bahan Konsep DIPA

1. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Alokasi Anggaran dalam UU APBN merupakan pagu suatu Kementerian/ Lembaga yang dapat dialokasikan pada DIPA satuan kerja - satuan kerja pada Kementerian Negara / lembaga berkenaan.
2. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagai dasar alokasi anggaran.
3. RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR, dan telah ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
4. Bagan Akun Standar.
5. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA).

Jenis DIPA Kementerian / Lembaga

1. DIPA Satker Pusat / Kantor Pusat, dengan kode kewenangan KP.
2. DIPA Satker Daerah / Kantor Daerah, dengan kode kewenangan KD.
3. DIPA Dana Dekonsentrasi, dengan kode kewenangan DK.
4. DIPA Tugas Perbantuan, dengan kode kewenangan TP.

C. Penyusunan RKA-KL

RKA-KL adalah sarana untuk perencanaan anggaran K/L. Penyusunan anggaran K/L adalah *domain* dari DJA. Dalam perkembangannya, karena program SPAN dikembangkan sistem yang terintegrasi ke dalam satker, maka untuk kepraktisan, pendanaan, dan pengembangan sistem yang terintegrasi di satker maka kita sepakat untuk pengembangan RKA-KL oleh tim SPAN yang mengembangkan

aplikasi dan bisnis proses di satker. Sistem penganggaran harusnya *bottom up* yang dimulai dari ujungnya adalah satker. (Ditjen Anggaran: Herry Purnomo, 2011:21)

Sejak disusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini berlandaskan konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. Penyempurnaan aplikasi RKAKL dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Diharapkan dengan perubahan ini informasi yang melekat pada RKAKL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKAKL ke dalam aplikasi.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/>

Untuk menjamin tercapainya sasaran kinerja dengan batas anggaran yang telah ditetapkan, baik untuk kegiatan fisik maupun alokasi anggaran penunjangnya di setiap satuan kerja, harus dilakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

Hasil penyusunan RKA-KL akan digunakan untuk proses penelaahan, dimana proses penelaahan ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu oleh internal dan Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Penelaahan pertama tidak hanya dilakukan terhadap kesesuaian dengan pagu anggaran dan struktur anggaran dalam lembar kerja RKA-KL, namun juga akan dilakukan verifikasi terhadap kesiapan tiap-tiap kegiatan yang akan didanai. Apabila tahap penelaahan internal

dapat dilakukan secara optimal, maka akan lebih meringankan tugas penelaahan kedua yang akan dilakukan di Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan dan tidak menghambat proses penelaahan internal dan penyampaian dokumen RKA-KL ke Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.

Prinsip-prinsip penganggaran dengan tataran teknis tata cara penyusunan RKA-KL dan penyusunan Aplikasi RKA-KL disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan Satuan Kerja, dengan tetap mengacu dengan aturan-aturan keuangan yang ada.

1. RKA-KL SMK SMTI Bandar Lampung

Sesuai RKA-KL dengan yang ada di SMK SMTI Bandar Lampung sesuai untuk peningkatan kualitas SDM Industri meliputi 5 kegiatan yaitu:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan
- 2) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri
 - Penyelenggaraan pendidikan kejuruan
 - Peningkatan mutu tenaga kependidikan
- 4) Penguatan lembaga/sarana dan prasarana
- 5) Laporan kegiatan
 - Laporan kegiatan Tupoksi
 - Dokumen program dan Kegiatan

D. Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan manusia yang dilaksanakan untuk membantu sesama manusia agar mau dan mampu meraih harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ini berarti bahwa tanpa pergaulan manusia tidak akan memperoleh pendidikan, (Napitupulu, 2004.1). Lebih lanjut menjelaskan pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana dengan mengubah tingkah laku manusia kearah yang diinginkan. Batasan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sengaja dan berencana, kemudian perubahan itu harus diarahkan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengertian pendidikan sesuai dengan UU nomor 1992 bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini ada kegiatan bimbingan yaitu memupuk dan mengembangkan mental, kegiatan pembelajaran guna menyampaikan pengetahuan dan informasi, dan kegiatan pelatihan menyangkut ketrampilan yang relevan dalam mencari bekal kehidupannya kelak.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara, (Prawira Dilaga, 2004: 333). Batasan ini

menekankan perlu diwujudkan suasana belajar dimana peserta didik aktif mengembangkan potensinya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.

1. Filosofi Pendidikan

Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.

Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.

2. Fungsi Pendidikan

Menurut Prawira Dilaga, (2004: 342), pendidikan memiliki dua prinsip yaitu pendidikan berlangsung sepanjang hayat (lifelong education) dan prinsip

pendidikan memiliki empat pilar belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar menjadi seseorang, dan belajar hidup bersama dengan orang lain.

Sedangkan lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (*manifes*) sebagai berikut:

- Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
- Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
- Melestarikan kebudayaan.
- Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Fungsi lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.

- Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
- Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
- Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan *prestise*, *privilese*, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.

- Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.

Terdapat empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:

- Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
- Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
- Menjamin integrasi sosial.
- Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
- Sumber inovasi sosial.

Peran pendidikan dalam penempatan tenaga kerja diharapkan dapat melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) yaitu bursa kerja yang berada disatuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Dirjen Bina Penta Nomor Kep 99/PPTK/IV/2009 tentang Tatacara Pelaporan Bagi LPTKS, Pemberi Kerja, BKK Dan Peyelenggara Pameran Kesempatan Kerja sesuai dengan pasal 1 ayat 7.

D. Anggaran Bidang Pendidikan

Secara singkat, anggaran (*budget*) dapat didefinisikan sebagai hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Dapat pula dinyatakan, anggaran merupakan sederetan daftar ataupun pernyataan-pernyataan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluarannya yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Lebih detail lagi, anggaran dapat didefinisikan sebagai hasil perencanaan berupa daftar

mengenahi berbagai macam kegiatan terpadu, baik yang berkenaan dengan penerimaan maupun pengeluaran, serta dinyatakan dalam satuan uang dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Anggaran juga dapat di artikan sebagai “suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”.

Pengertian dasar tentang anggaran diatas, menggambarkan berbagai unsur yang harus di penuhi dalam menyusun sebuah anggaran, yakni. Pertama, unsur rencana yang berarti menunjuk adanya inventarisasi berbagai kegiatan yang akan direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, anggaran harus mencakup seluruh kegiatan organisasi termasuk kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh divisi atau departemen-departemen yang ada dalam organisasi tersebut. Ketiga, anggaran dinyatakan melalui unit moneter atau mata uang tertentu.

Unsur ketiga ini untuk memudahkan penjumlahan, membandingkan, maupun menganalisa jika organisasi tersebut dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya bersentuhan dengan satuan moneter tertentu, melainkan beragam mata uang asing. Misalnya, organisasi menjalin kerja sama dengan Uni Eropa dan lain-lain.

Keempat, unsur waktu yang berarti bahwa anggaran secara eksplisit juga harus mencantumkan waktu berlaku dimasa selanjutnya, baik strategis maupun taktis.

Selain empat unsur diatas, unsur-unsur lain yang harus dipenuhi dalam anggaran adalah formalitas, sistematis, akuntabilitas, dan managerial. Pertama, anggaran harus bersifat formal yang disusun secara sengaja dalam bentuk tertulis. Kedua, anggaran juga harus sistematis yang berarti disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika. Ketiga, anggaran tersusun melalui proses pengambilan

keputusan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, khususnya oleh pimpinan organisasi. Keempat, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran tetap berada dalam koridor manajemen (perencanaan, koordinasi, dan pengawasan).

Pada hakikatnya anggaran merupakan pendapatan dan belanja suatu program yang berkaitan dengan sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran uang. Anggaran disini merupakan sebuah alat untuk: (1) menentukan sumber dana. (2) membuat perkiraan atau prediksi. (3) membandingkan pengeluaran dan pemasukan. (4) menentukan prioritas. (5) mengkaji nilai rencana alternatif. (6) melaksanakan rencana. (7) Mengkoordinasikan kegiatan sekolah. (8) memperkuat tanggung jawab.

Dalam masyarakat yang berkembang terdapat tiga definisi tentang anggaran pendidikan. Pertama, anggaran pendidikan mencakup semua sektor pendidikan. Hal itu berarti, semua anggaran yang terkait dengan pendidikan adalah termasuk anggaran pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen lain. Oleh karena itu, anggaran pendidikan militer, anggaran pendidikan pegawai negeri sipil, anggaran pendidikan kepolisian, dan lain- lain termasuk bagian dari anggaran pendidikan. Kedua, anggaran yang hanya berkait dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Ketiga, anggaran pendidikan adalah semua anggaran pendidikan nasional, tepatnya, keseluruhan anggaran pendidikan di semua Departemen. Kecenderungan para pakar pendidikan mendefinisikan anggaran pendidikan adalah, keseluruhan anggaran yang hanya berkaitan dengan

sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dengan kata lain, bahwa anggaran pendidikan merupakan keseluruhan anggaran yang diarahkan pada pemenuhan pendidikan masyarakat umum dan semua hal yang menunjang pendidikan di kelas atau sekolah. Kebutuhan tentang anggaran pendidikan dalam organisasi inidipergunakan dalam membiayai setiap kegiatannya.

Salah satu dari bagian organisasi adalah lembaga pendidikan yang tentu juga membutuhkan biaya atau pendanaan dalam rangka melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kebutuhan biaya atau pendanaan didasarkan atas kenyataan sebagai organisasi tentu mencerminkan adanya wadah dengan berbagai aktifitas-aktifitasnya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam gambaran lebih luas dapat dinyatakan, lembaga pendidikan juga dapat dinyatakan memiliki dua arah yang berjalan sekaligus, secara struktural statis dan secara behavioral bersifat dinamis. Masing-masing agar dapat berjalan secara berkelanjutan membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan biaya itu sendiri menjadi faktor dominan keberhasilan mempertahankan keberlangsungan organisasi, baik yang bersifat struktural maupun behavioral.

Lembaga pendidikan membutuhkan biaya administrasi, perlengkapan, dan biaya program pembelajaran. Pertama, biaya administrasi (*administration expenses budget*) adalah keseluruhan anggaran atau dana yang diperuntukkan pada pemenuhan kebutuhan lingkungan kerja administrasi. Termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya gaji pegawai dilingkungan kerja, pemenuhan bahan-bahan yang diperlukan oleh masing-masing bagian di Bagian Administrasi,

pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lembaga pendidikan, pemeliharaan alat-alat untuk masing-masing bagian di Bagian Administrasi, listrik, biaya telekomunikasi, dan lain- lain.

Kedua, biaya perlengkapan merupakan seluruh anggaran yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah keseluruhan perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan, prasarana adalah semua perlengkapan dasar yang dapat mendukung atau menunjang proses pendidikan di sekolah.

Termasuk sarana dan prasarana lembaga pendidikan, diantaranya kantor sekolah, ruang teori atau kelas, ruang keputakaan, ruang laboratorium, ruang UKS/BP, ruang sebagian/senam/kesenian, ruang kepala sekolah/administrasi, ruang guru, gudang, kamar mandi/WC murid, kamar mandi/WC guru, kantin, bangsal kendaraan, ruang ibadah, ruang penjaga, halaman sekolah, lapangan upacara, lapangan olah raga, kebun, pagar, fasilitas air, fasilitas penerangan, rumah kepalasekolah, dan rumah guru.

Ketiga, biaya program pembelajaran disebut juga seluruh anggaran yang untuk memenuhi kebutuhan program pembelajaran. Diantara biaya yang diperlukan dalam program pembelajaran adalah, biaya untuk memenuhi kebutuhan perabot kelas dan media pengajaran. Kebutuhan perabot kelas misalnya, papan tulis, meja dan kursi guru, meja dan kursi murid, lemari kelas, papan daftar hadir murid, papan daftar piket, papan pemajangan karya murid, meja pemajangan murid, papan grafik pencapaian target kurikulum, papan daftar pengelompokan murid, dan papan grafik kehadiran murid. Sedangkan, biaya media pengajaran adalah

semua kebutuhan terkait dengan kepentingan efektifitas proses belajar mengajar dikelas. Termasuk kebutuhan biaya media pengajaran, diantaranya media pandang diproyeksikan, media pandang tidak di proyeksikan, media dengar, dan media pandang dengar. Selain itu, juga dibutuhkan biaya gaji tenaga pendidikan (guru dan kepalasekolah) yang juga sebagai bagian dari biaya program pembelajaran.

E. Pengangguran

Pengangguran atau Tuna Karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka. Menurut Dumairy, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketidadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.

Dari sisi nasional, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, keamanan, dan sosial sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya Produk Nasional Bruto dan pendapatan per kapita suatu Negara.

BPS (2009) dalam publikasi analisis kemiskinan, ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan menyebutkan bahwa pengangguran dilihat dari penyebabnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

- a. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Penduduk tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk memasuki sektor baru sehingga mereka menganggur. Contoh: para petani kehilangan pekerjaan karena daerahnya berubah dari daerah agraris ke daerah industri.
- b. Pengangguran siklus yaitu pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian (misal terjadi resesi) sehingga menyebabkan berkurangnya permintaan masyarakat (*agregat demand*).
- c. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.

- d. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja.
- e. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya penggunaan alat-alat teknologi yang semakin modern menggantikan tenaga kerja manusia.

Indikator pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Masalah yang sering dihadapi adalah masalah setengah menganggur atau pengangguran tidak kentara, yang pengertiannya adalah sebagai berikut :

1. Setengah menganggur

Keadaan setengah menganggur (*underemployment*) terletak antara full employment dan sama sekali menganggur. Pengertian yang digunakan ILO, Underemployment yaitu perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.

Konsep ini dibagi dalam :

- a) Setengah menganggur yang kentara: Setengah menganggur yang kentara (*visible underemployment*) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (*part time*) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.

- b) Setengah menganggur yang tidak kentara: Setengah menganggur yang tidak kentara (*invisible underemployment*) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi karena pendapatannya terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.

2. Pengangguran tidak kentara

Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*), dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka menganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya. Jadi di sini mereka sebenarnya tidak mempunyai produktivitas dalam pekerjaannya. Misalnya mereka terdiri dari 4 orang yang bersama-sama bekerja dalam jenis pekerjaan yang sesungguhnya dapat dikerjakan oleh 3 orang sehingga 1 orang merupakan '*disguised unemployment*'.

3. Pengangguran friksional

Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai waktu tenggang dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

Menurut Lincoln Arsyad (1999: 35), untuk memperoleh pengertian sepenuhnya tentang arti penting dari masalah ketenagakerjaan (*employment*) di perkotaan, kita harus memperhitungkan pula masalah penambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar yaitu mereka yang kegiatannya aktif bekerja tetapi secara

ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh (*underutilized*). Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran, menurut Edgar O. Edward (tahun 1974) buku Ekonomi Pembangunan (Lincolin Arsyad, 1999: 35) perlu diperhatikan dimensi-dimensi:

1. Waktu (banyak di antara mereka yang bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun).
2. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya-sumber daya komplementer Untuk melakukan pekerjaan).
3. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan)

Menurut Edgar O. Edward (tahun 1974) pengangguran dibagi kedalam 5 bentuk:

1. Pengangguran terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).
2. Setengah menganggur (*underemployment*): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka biasa kerjakan.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, termasuk di sini adalah: a. Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), misalnya para petani yang bekerja di lading selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh. b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*), misalnya oaring yang bekerja tidak Sesuai dengan tingkat

atau jenis pendidikannya. c. Pensiun lebih awal, fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun dipermuda sebagai alat menciptakan peluang bagi yang muda untuk menduduki jabatan di atasnya.

4. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*): yaitu mereka yang mungkin bekerja *full time*, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
5. Tenaga kerja yang tidak produktif : yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumber daya-sumber daya penolong kurang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan

Kualitas mutu dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana transformasi pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pengangguran. Secara umum kesempatan kerja akan lebih besar didapat oleh mereka yang berpendidikan tinggi, tetapi bila tingkat pendidikan seseorang tidak sama dengan kebutuhan di lapangan, maka setidaknya kondisi tersebut akan menjadi kendala bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, dan pada akhirnya

akan timbul di antara mereka yang sebenarnya mempunyai tingkat pendidikan cukup tinggi.

Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi di suatu wilayah. Indikator ini mampu menggambarkan perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan tingkat atas (SMA) dan yang setara ditambah dengan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi (perguruan tinggi/universitas), yang dianggap kelompok terdidik, terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut.

F. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Klasifikasi Tenaga Kerja berdasarkan penduduknya dapat dibagi 2 yaitu tenaga kerja: Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun dan yang 2) Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Berdasarkan batas kerja dibagi 2 yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

1) Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 2) Bukan angkatan kerja, bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: a) anak sekolah dan mahasiswa, b) para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan, c) para pengangguran sukarela

Berdasarkan kualitasnya: tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam

bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain, dan Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Berikut ini beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja, Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.
2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.
3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata, Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan,

dan kehutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

4. Pengangguran, Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.

G. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, radar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka,

demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Secara lebih sederhana pengertian mutu atau kualitas perlu dirumuskan secara jelas sehingga menjadi acuan untuk mencapainya. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa atau sumber daya manusia yang dihasilkan. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas>

Kualitas dapat diberi pengertian sesuatu yang cocok/sesuai dengan selera seseorang (*fitness for use*), barang atau jasa yang dapat menaikkan status pemakai, kualitas adalah barang atau jasa yang memberikan manfaat pada pemakai.

Sedangkan untuk kemampuan seseorang kualitas adalah suatu standar khusus dimana kemampuannya (*availability*), kinerja (*performance*), keandalannya (*reliability*) kemudahan pemeliharaan (*maintainability*) dan karakteristiknya dapat diukur (Juran, 2008:1)

Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, atau kualitas sebagai kesesuaian dengan . Dengan menggabungkan beberapa definisi tersebut UGM (2002) mendefinisikan mutu pendidikan tinggi sebagai berikut : kualitas lulusan adalah pencapaian tujuan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan didalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standard yang

telah ditentukan. Secara luas pengertian kualitas sumber daya manusia dapat mencakup aspek sarana / prasarna, organisasi, manajemen, masukan, proses, keluaran yang dapat memuaskan pelanggan internal (guru, staf administrasi, pengelola universitas) serta pelanggan eksternal (mahasiswa, orang tua, masyarakat pengguna serta masyarakat yang lebih luas). Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Salah satu indikator kualitas SDM Industri yang baik adalah memiliki kompetensi baik pengetahuan dan ketrampilan, sikap, dan tingkat keterserapan yang tinggi baik disunia kerja maupun didunia industri. Keterserapan lulusan memberikan gambaran jumlah perbandingan jumlah siswa yang lulus dengan yang diterima diperusahaan dalam masa tunggu tertentu.

Dalam membantu keterserapan lulusan di dunia kerja, dimana siswa telah diberikan pembekalan menjelang lulus dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi dunia kerja. Selain itu lulusan juga dibantu memperoleh akses ke industri melalui berbagai program kerja antara lain dengan perusahaan mengadakan tes dan seleksi di sekolah melalui Bursa Kerja Khusus di bawah waka bidang humas berupa kerjasama dengan beberapa perusahaan dibuktikan dengan MoU.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas sesuai dengan kualitas yang ada di sekolah dapat diukur melalui

1. Pengetahuan dan Ketrampilan (yang dilihat dari nilai dan kompetensi yang dihasilkan)

2. Sikap baik dari sisi kedisiplinan, kerajinan, dan kerapian dan kelakuan
3. Keterserapan lulusan di dunia industri atau dunia kerja

H. Studi Empiris

1. Berdasarkan telaah kepustakaan yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dan berkaitan dengan variabel penelitian ini, antara lain hasil penelitian **Armida** (2012) dengan Judul "Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi) tahun 2012".

Yang berbeda dari penelitian ini ialah hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber penerimaan anggaran madrasah hanya mengandalkan anggaran APBN yang bersumber dari Pemerintah Kementerian Agama dan sumber masyarakat (Komite Madrasah), baik di madrasah yang berstatus negeri maupun di madrasah yang berstatus swasta.

2. **Satriana Maraya** (2010), berjudul "Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Reguler Di UPTP Balai Latihan Kerja Industri Makassar Periode 2010".

Yang berbeda dari penelitian ini adalah penelitian ini memberi kontribusi dan memperkaya pengetahuan tentang proses pengevaluasian suatu gejala atau kegiatan khususnya tentang program pelatihan reguler. Program pelatihan reguler ini merupakan program dari pemerintah yang dibiayai dari dana

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA). Program APBN (regular) ini ditujukan untuk para pencari kerja khususnya masyarakat yang kurang mampu dan juga untuk yang telah putus sekolah .

Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	Armida, 2012. (Disertasi)	Studi Tentang Sistem Penganggaran Pendidikan dan Efektivitas Penggunaan Biaya Pendidikan serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Jambi.	Biaya Pendidikan. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dapat disimpulkan bahwa biaya adalah salah satu penentu berjalannya aktivitas aktivitas PBM, dan juga didukung oleh faktor-faktor lain untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah. Sedangkan anggaran pendidikan adalah berfungsi sebagai alat bantu penggerak sistem manajemen pengelolaan pendidikan madrasah.

2.	Satriana Maraya, 2010. (Skripsi)	Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Reguler Di UPTP Balai Latihan Kerja Industri Makassar Periode 2010	Fungsi Evaluasi. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur yang terdapat dalam suatu pelatihan seperti peserta, pelatih/instruktur, lamanya latihan, materi (bahan latihan), metode pelatihan, media pelatihan sebagian masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para peserta program pelatihan reguler khususnya yang berkaitan dengan instruktur pelatihan dan media pelatihan yang digunakan.
----	--	--	---	---
